PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN

Veronica Sarah¹, Hudi Yusuf²

sarah.verosa@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Universitas Bung Karno

ABSTRAK

Restorative justice merupakan salah satu alternative penyelesaian yang dinilai dapat menurunkan angka tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia. Ada banyak kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang terjadi di Indonesia. Dengan ada regulasi terkait penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dinilai dapat mengurangi penumpukan perkara pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana pelaksanaan restorative justice tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia pada tingkat penyidik kepolisian. Penelitian ini bertujuan melihat penyidik kepolisian melaksanakan restorative justice dalam tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Konsep restorative justice pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas; 2) Dalam pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia, peran penyidik hanya sebagai fasilitator serta mediator dan semua keputusan diserahkan kepada para pihak; dan 3) Strategi yang dilakukan para penyidik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia juga harus sesuai dengan teori perlindungan korban dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap pelaku.

Kata Kunci: Restorative justice, Tindak pidana pemindahtanganan, Objek jaminan fidusia.

ABSTRACT

Restorative justice is an alternative solution which is considered to be able to reduce the number of criminal acts of alienating fiduciary objects. There are many cases of transfer of fiduciary collateral objects that occur in Indonesia. By having regulations related to the application of restorative justice in resolving criminal cases, it is considered that it can reduce the buildup of cases regarding the transfer of existing fiduciary collateral objects. In this research, the main topic of discussion is how restorative justice is implemented in the criminal act of alienating the object of fiduciary guarantees at the police investigator level. This research aims to see police investigators implementing restorative justice in criminal acts of alienating fiduciary objects. In this research it can be concluded that 1) The concept of restorative justice in the criminal act of alienating the object of fiduciary guarantees makes the resolution of criminal cases simple and straightforward; 2) In implementing restorative justice in the criminal act of alienating fiduciary objects, the investigator's role is only as a facilitator and mediator and all decisions are left to the parties; and 3) The strategies carried out by investigators to support the successful implementation of restorative justice in criminal acts of alienating fiduciary collateral objects must also be in accordance with the theory of victim protection and still uphold legal protection for perpetrators.

Keywords: Restorative justice, criminal acts of transfer, objects of fiduciary guarantees.

PENDAHULUAN

Fidusia sering disebut juga hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh

yurisprudensi (Oey,1985). Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan hubungan kontraktual yang lahir atas dasar kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, yang mana hak milik objek fidusia diserahkan kepada kreditur, namun objek fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia (Martin,2019).

Penyerahan atas dasar kepercayaan disebut *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaan). *Constitutum Possessorium* adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor (Munir, 2003)

Problematika hukum dalam jaminan fidusia adalah sering kali pemberi fidusia memindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Perbuatan pemberi fidusia yang memindahtangankan dan menggadaikan merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 36. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pula mengenai tindak pidana penggelapan pada Bab XXIV Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Dengan digelapkannya benda fidusia akan menyulitkan eksekusi yang dilakukan penerima fidusia karena benda yang dijadikan jaminan tidak berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Jika pemberi fidusia diduga melakukan tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia maka penyelesaian yang dilakukan sangat panjang karena meliputi rangkaian penyidikan, penuntutan, persidangan dan berakhir pada lembaga permasyarakatan.

Menurut Eva Achjani Zulfa , keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Eva, 2009). Sedangkan menurut Bagir Manan pengertian secara umum keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku, korban, maupun masyarakat (Albert, 2006)

Penggunaan pendekatan *restorative justice* pada tingkat penyidik kepolisian merupakan implementasi dari Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. penggunaan *restorative justice* pada tingkat penyidik kepolisian juga merupakan salah satu cara mengurangi kondisi *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan, terlebih Kepolisian merupakan garda terdepan dalam sistem pemidanaan yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan serta memediasi penyelesaian perkara.

Kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* dapat merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian konsep penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai dokumen dasar penelitian dengan mencari

peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Soekanto,1985).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Didalam Pendekatan kasus, peneliti berupaya mengkonstruksi argumentasi hukum dari kasus-kasus tertentu yang terjadi dalam praktik yang erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Tujuan pendekatan semacam ini pada umumnya adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan penyelesaian terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan asas keadilan. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Tujuan pendekatan ini adalah untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Nasution,2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN RESTORATIVE JUSTICE

Pasal 1 nomor 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice merupakan bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni, pada saat yang bersamaan sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara para pihak yang berperkaranya dengan kepentingan masa depan.

Adapun ide dan prinsip *restorative justice* yakni (I Made, 2015) : a) Penanganan konflik (*Conflict Handling*); b) Berorientasi pada proses (*Process Orientation*); c) Proses Informal (*Informal Proceeding*); dan Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation*). Para pihak (pelaku serta korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, namun lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Praktik dan program *restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan (Mc Cold and Wachtel,2003) :

- a) *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b) *Involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);
- c) *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).

Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini antara lain (Yiniar, 2014):

- a) *Victim Offender Mediation* (VOM)

Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*) atau disebut dialog/pertemuan/rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban,yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara,

maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku

b) *Family Grup Conferencing* (FGC)

Pertemuan kelompok keluarga (family group conferencing) merupakan lingkaran partisipasi yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional.

c) *Restorative Conferencing* (CR)

Pertemuan restoratif (restorative conferencing) juga melibatkan partisipasi yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku-korban, sebagai respon terhadap pelanggaran lalu lintas. Teknik ini bersifat *volunter* (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal.

d) *Community Restorative Boards* (CRB)

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi.

JAMINAN FIDUSIA

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan yang didasari dengan kepercayaan. Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah (Munir, 2003)

- a) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- b) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Konsekuensi hukum pada pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur ada dua bentuk yaitu pertama, jika termasuk dalam ruang lingkup perdata jika jaminan fidusia tidak didaftarkan ke instansi yang berwenang. Kedua, termasuk dalam ruang lingkup perdata jika jaminan fidusia sudah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu kantor pendaftaran fidusia (Uly, 2015)

Ketentuan Pidana Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“ setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (5) lima tahun dan denda paling sedikit Rp.10,000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“ *Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.*”

Dalam pasal 36 dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 yang berbunyi :

” *Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia.*”

Jika Lembaga Pembiayaan (*leasing*) telah mendaftarkan Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang, dan memperoleh kuasa dari pemberi fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia yang dimaksud, maka jika terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan bendayang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka Pemberi Fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ANALISIS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA TINGKAT PENYIDIK KEPOLISIAN

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian merupakan salah satu cara untuk mendukung penerapan program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum yaitu penegakan hukum yang bersih, professional dan adil. Konsep *restorative justice* menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas. Penyidik sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada garda terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana dituntut untuk selalu menangani kasus pidana secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia terjadi karena adanya kesepakatan damai antara para pihak. Kesepakatan di tentukan di dalam surat perdamaian, syarat materil dan formil harus terpenuhi tidak terkecuali. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, kemudian dilakukan pemeriksaan kembali terhadap pelapor yang dilakukan oleh penyidik lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang berisikan pelapor menarik kembali pernyataan sebelumnya yang menyebabkan berkurangnya alat bukti keterangan saksi korban. Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Dengan hasil gelar perkara tersebut kemudian direkomendasikan untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Kedua surat tersebut diajukan kepada Kapolres dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk di kirim ke Jaksa Penuntut Umum. Kemudian penyidik membuat Surat Perintah Pemberitahuan Hasil Penyidikan A5 untuk diberitahukan kepada pelapor bahwa perkara yang dilaporkan sudah diberhentikan penyidikannya.

Istilah *restorative justice* secara umum sudah sering di dengar terlebih dalam kalangan polri namun belum banyak yang memahami makna dan penerapannya, karena *restorative justice* tergolong baru dalam penegakan hukum pidana. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian hanya menjelaskan mengenai diskresi sesuai dengan pasal

18 bahwa kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri “Demi Kepentingan Umum”. Namun dalam prakteknya masih banyak anggota polri yang masih ragu untuk menggunakan wewenang tersebut terutama dalam penanganan kasus tindak pidana. Dalam memberikan pengetahuan anggota polri mengenai *restorative justice* harus diimbangi dengan pemahaman konsep diskresi karena keduanya saling terkait dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Kewenangan diskresi kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik dapat melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan yang mengutamakan perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua daripada pertimbangan hukum yang lebih menjurus kepada pemidanaan yang berujung pemenjaraan. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, peran penyidik hanya sebagai fasilitator serta mediator dan semua keputusan diserahkan kepada para pihak. Namun dengan disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk perlu mewujudkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan sediakala, keseimbangan perlindungan, dan kepentingan korban atau pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum untuk masyarakat.

Restorative justice pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni dengan adanya perdamaian antara para pihak yang berperkara dan ditindaklanjuti dengan permohonan pencabutan laporan dari pihak pelapor. Pihak kepolisian kemudian akan melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar perdamaian dan surat permohonan pencabutan laporan.

Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada dasarnya *restorative justice* adalah alternatif penyelesaian hukum pidana yang selama ini dipandang kaku karena hanya terpaku pada pemidanaan yang berujung pemenjaraan saja. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk keadilan yang memberikan alternative penyelesaian perkara pidana yang penerapannya harus tetap dalam wujud penegakan hukum dan keadilan hukum terhadap semua pihak dan tidak bertujuan untuk mengaburkan penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan *restorative justice* tidak boleh dinodai dengan cara dimanfaatkan untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana tanpa memperhatikan ketidakadilan yang diderita oleh pihak lainnya.

Dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia terhadap pelaku, tidak berarti pelaku tidak bersalah, namun karena pelaku tindak pidana tetap bersalah karena melakukan perbuatan yang menyimpang. Akan tetapi perbuatan salahnya tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan dengan cara menghukum pelaku, tetapi perlu pertimbangan lain seperti melihat kondisi hunian di Lembaga Permasyarakatan di Indonesia banyak mengalami *over crowded*. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mediasi dengan tidak seorang diri, harus melibatkan pihak lain yang terlibat dalam perkara pidana tersebut antara lain korban, pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia harus sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang mana tugas penyidik sebagai fasilitator mediasi membuat para pihak melupakan kerangka hukum terkait pelaksanaan proses pidana dan mendorong para pihak terlibat komunikasi secara langsung dalam mengutarakan keinginan masing-masing dalam pertemuan/mediasi yang sesuai dengan prinsip *conflict handling* (penanganan konflik). Selanjutnya prinsip *process orientation* juga harus diterapkan dimana orientasi lebih ke kualitas proses daripada hasil dengan sadarnya pelaku atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga pelaku/terlapor memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Point pada prinsip ini tidak hanya pelaku/terlapor mengakui kesalahan yang dilakukan, namun juga pelaku/terlapor memiliki kesadaran akan tanggung jawab memulihkan keadaan pada semula yang dapat dilakukan berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, atau mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana.

Prinsip pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan sudah seiring dengan strategi penyidik melakukan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia, yaitu dengan tetap melaksanakan pengawasan terhadap pelaku setelah terjadi *restorative justice* dengan melakukan wajib lapor selama beberapa waktu setiap hari senin atau kamis. Pelaku bisa tidak melakukan wajib lapor jika penyidik sudah menilai bahwa pelaku sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa yang akan datang dengan kooperatifnya pelaku dalam melakukan wajib lapor serta dilihat dari proses pemeriksaan apakah pelaku sudah kooperatif dari awal mengakui kesalahannya atau tidak.

Strategi yang dilakukan para penyidik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia juga harus sesuai dengan teori perlindungan korban, dimana korban diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya terkait sistem ganti kerugian tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Penyidik tetap menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap pelaku sesuai dengan salah satu ciri negara hukum yaitu dengan adanya asas kesamaan di hadapan hukum (*equity before the law*) yang tercantum dalam Pasal 28D UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas
2. Dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia, peran penyidik hanya sebagai fasilitator serta mediator dan semua keputusan diserahkan kepada para pihak
3. Strategi yang dilakukan para penyidik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia juga harus sesuai dengan teori perlindungan korban dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap pelaku.

Dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Urgensi penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* multak dilakukan sehingga terciptanya keadilan antara pelaku dan korban. Diperlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk melaksanakan *restorative justice* pada tindak pidana pada umumnya terutama fidusia karena masih diatur sendiri dalam peraturan kepolisian saja.
2. Untuk masyarakat, dalam penyelesaian perkara sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah mufakat, salah satunya melalui *restorative justice*.

3. Untuk aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian lebih diutamakan prinsip win-win solution dan dalam hal apapun harus aktif mencari keadilan restorative justice dengan terlebih dahulu mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak yang bertujuan mendamaikan keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Aries, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, (Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006),3.
- Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan Kedua. CV Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009),65
- I Made Agus Mahendra Iswara, “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, Tesis, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015,51.
- Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Unsur-unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 21
- Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2019),48.
- Mc Cold and Wachtel, “Restorative Justice”, (Pennsylvania : The International Institute for Restorative Practices, 2003),7.
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003),10.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Jakarta Press
- Uly Fadlihatin Muna“amah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”,skripsi,(Jogjakarta,2015),4.
- Yiniar Ariefianto, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", Tesis, (Malang : Universitas Brawijaya, 2014), 16.
- PERATURAN**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana